

## **ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG**

**Reivaldo Roel, Frida Magda Sumual, Aprili Bacilus**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Negeri Manado*

[roelduvan018@gmail.com](mailto:roelduvan018@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkiraan dan pengungkapan pelaksanaan impor barang di Kantor Pengawasan dan Tata Usaha Negara Bea dan Cukai Manado sesuai dengan Undang-Undang tentang Pedoman Pendeta Uang No. 41/PMK.010/2022 dan selanjutnya untuk mengetahui pencatatan Pengeluaran Pribadi Pasal 22 atas pelaksanaan impor barang dagangan. . Teknik berwawasan yang digunakan adalah strategi yang jelas, yaitu dengan mengumpulkan informasi, mengurutkan, kemudian, menguraikan dan menguraikannya dengan menelusuri kembali informasi tersebut untuk memberikan gambaran yang utuh. Akibat dari penjajakan tersebut, perhitungan dan pengumuman PPh Pasal 22 atas pelaksanaan impor barang dagangan di Kantor Pengawasan dan Tata Usaha Bea dan Cukai Manado sesuai dengan Pedoman Pendeta Uang Nomor 41/PMK.010/2022. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan PMK No 41/PMK.010/2022 tanggal 1 April 2022 yang telah terekam dalam Pasal II PMK nomor 41/PMK.010/2022, terhadap pedoman ini mulai tanggal 1 April 2022 semua barang impor yang dikenakan untuk penggolongan Biaya Tahunan Impor Pasal 22 yang terkumpul telah mengikuti berapa banyak ragam Bea Masuk Pasal 22 sesuai PMK.

**Kata Kunci : Perhitungan dan Pelaporan, Impor Barang, PPh Pasal 22**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Biaya adalah sesuatu yang harus dibayar oleh individu dan asosiasi di suatu negara. Legislatif, baik di tingkat publik maupun di tingkat terdekat, mendapatkan penghasilan dari penilaian ini. Biaya adalah mata air pembiayaan untuk perbaikan publik serta menjadi mata air pendapatan pemerintah. Bea adalah angsuran penduduk ke Negara, di bawah hukum semacam paksaan, tidak secara langsung menciptakan keuntungan yang sama, dan digunakan untuk mendanai proyek-proyek kepentingan umum. Definisi yang disebutkan sebelumnya mendorong seseorang untuk mengakhiri bahwa warga negara individu dan korporat diharapkan membayar biaya sesuai kebutuhan. Selain itu, pendapatan biaya adalah

uang tunai yang diperoleh oleh otoritas publik melalui komitmen individu terhadap sistem penilaian. Pada periode ini, beban juga mengambil bagian penting dalam pendapatan negara. Ini terkait dengan alasan bahwa tugas adalah sumber pembiayaan bagi otoritas publik dan menunjukkan bagaimana individu bekerja sama dalam membayar otoritas publik sesuai hukum. Ini menunjukkan bahwa bea masuk memberikan asumsi atau jaminan atau spesifikasi khusus yang membantu kemajuan moneter Indonesia. (Aprili Bacilus 2021, Gloria I.P. Manopo, Ventje A. Sendok). Biaya sangat bergantung sebagai sumber utama uang untuk pendapatan moneter, dukungan moneter, dan pengeluaran pemerintah. Setiap properti yang dimiliki oleh populasi atau warga negara secara keseluruhan dibebani

sesuai peraturan dan pedoman material. Pada tahun 2020, Langi, Winerungan, dan Sumual

Sehubungan dengan mendukung pembangunan publik di berbagai bidang, biaya adalah salah satu mata air utama pendapatan negara yang harus dibayar oleh populasi secara keseluruhan sesuai peraturan dan pedoman terkait. Negara membutuhkan rencana keuangan yang luar biasa, yang mendapat uang tunai pengeluaran masa lalu, untuk mendukung pembangunan publik. Menurut Peraturan Nomor 16 Tahun 2009, Bea adalah komitmen angsuran kepada Express yang harus dibayar oleh individu atau asosiasi yang memaksa dalam pandangan Undang-Undang, yang tidak langsung dibayar dan digunakan untuk tujuan Negara untuk keberhasilan terbaik individu. PPh Pasal 22 merupakan salah satu tugas yang dihimpun oleh Indonesia dan masuk ke lembaga penyimpanan otoritas publik. Pasal 22 Tugas pribadi atau disebut PPh pasal 22 atau pengeluaran pribadi adalah penilaian yang dipaksakan oleh pemodal otoritas publik untuk legislatif pusat dan terdekat, stansi, atau kantor-kantor pemerintah, dan lembaga negara lainnya mengenai angsuran pengangkutan barang dagangan, serta untuk kepentingan pemerintah tertentu dan unsur-unsur rahasia mengenai latihan di bidang impor atau latihan bisnis di berbagai bidang. Pasal 22 Biaya Tahunan memiliki Peraturan nomor 36 tahun 2009 sebagai premis yang sah. 2019 (Sampouw et al.).

Sebagaimana ditunjukkan oleh undang-undang, tugas adalah angsuran penduduk ke penyimpanan umum. Biaya bersifat memaksa dan tidak memberikan keuntungan yang jelas untuk membayarnya. Angsuran biaya membahas kontribusi individu dalam tanggung jawab moneter negara dan upaya untuk mendorong pergantian peristiwa publik. Membawa barang-barang yang tersedia adalah salah satu latihan yang tersedia. APBN sebagian besar disubsidi melalui biaya

(APBN). mengingat informasi dari Organisasi Pengukuran Fokal, dari 2020 hingga 2022

Menurut Prof. Dr. Romachmat Soemitro, SH., yang akan datang berikutnya adalah bagaimana beban dicirikan: Sesuai peraturan (dapat ditegakkan), biaya adalah apa yang orang bayar ke penyimpanan negara sebagai pengganti mendapatkan administrasi terkait yang dapat disertifikasi dengan cepat (counterperformance), yang kemudian digunakan untuk mengurus pengeluaran publik. Setelah itu, ungkapan itu diubah menjadi teliti, "Biaya adalah pertukaran uang tunai dari individu ke penyimpanan negara untuk mendukung konsumsi rutin dan" kelebihan "digunakan untuk dana cadangan umum yang merupakan sumber utama mendukung spekulasi publik." Tugas adalah komitmen warga negara kepada negara yang dimiliki oleh individu atau elemen yang bersifat memaksa dalam pandangan peraturan, tanpa pembayaran langsung, dan digunakan untuk keperluan negara betapapun banyaknya individu yang berkembang, sesuai dengan Peraturan Nomor 28 Tahun 2007 tentang pengaturan umum dan metode tugas.

Membawa produk yang tersedia adalah salah satu demonstrasi yang tersedia. Demonstrasi membawa produk dari negara lain (luar negeri) ke satu negara lagi digambarkan dalam tulisan. Sebagaimana ditunjukkan oleh gagasan ini, kegiatan impor panjang dua negara (Susilo 2008: 101). Membawa barang atau barang ke suatu negara sering disebut sebagai gerakan impor. Bea masuk dipaksa untuk melindungi pembuat lokal dan menghukum pedagang dengan biaya pengiriman barang atau barang ini. Membawa barang dagangan yang tersedia adalah salah satu demonstrasi yang tersedia. Demonstrasi membawa barang-barang dari negara lain (luar negeri) ke negara lain digambarkan dalam tulisan. Sesuai gagasan ini, kegiatan impor berkisar dua negara (Susilo 2008: 101). Membawa barang atau produk ke suatu negara sering disebut sebagai tindakan impor. Bea

masuk dipaksa untuk melindungi pembuat homegrown dan menghukum pedagang dengan biaya transportasi barang atau produk ini. (Pratiwi, 2021). Pasal 22 Biaya Pribadi adalah biaya yang dibuat oleh otoritas publik pada latihan terkait impor. Pasal 22 tingkat pengeluaran pribadi. Pasal 22 biaya adalah biaya yang dipaksa oleh zat pemerintah, termasuk birokrasi, negara bagian, dan legislatif terdekat, serta organisasi negara lainnya yang mendapatkan angsuran untuk pengangkutan produk dan asosiasi tertentu, baik publik maupun swasta, yang mendapatkan angsuran untuk latihan terkait impor atau latihan terkait bisnis lainnya.

Mengingat Direktorat Jenderal Bea dan Ekstrak, Kantor Manajemen dan Administrasi Bea Cukai Manado Tipe C Tipe C adalah organisasi ke atas yang dipercayakan untuk menjamin rencana pemerintah dalam hal pengembangan barang dagangan di seluruh wilayah tradisi Indonesia serta bermacam-macam kewajiban impor, kewajiban cuti, ekstraksi, dan persyaratan negara lainnya sesuai peraturan dan pedoman material.

Pengeluaran pribadi berdasarkan Pasal 22 harus dibayar tidak kurang dari satu tahun, baik dengan menyimpan atau bermacam-macam oleh pihak tertentu. Biaya yang telah disimpan atau dikumpulkan kemudian akan disimpan dan dirinci oleh pengumpul. Impor diselesaikan sesuai Pedoman Pendeta Uang (PMK) No. 41/PMK.010/20 22 Perubahan Pedoman Imam Uang No. 110/PMK.010/2018 dan 34/PMK.010/2017 tentang Berbagai-macam Pengeluaran Pribadi Pasal 22 Tentang Angsuran Pengangkutan Produk dan Latihan di Bidang Impor atau Latihan Usaha di Berbagai Bidang. Huruf A: PMK No. 41/PMK.010/20 10% insentif impor untuk organisasi tanpa memandang Nomor bukti Pembeda Pengirim (Antarmuka pemrograman), 41/PMK.010/2018 huruf B produk berbeda tertentu, untuk bea masuk atas barang tertentu 7,5% tanpa menggunakan Nomor Merchant ID (Antarmuka

pemrograman), 41/PMK.010/20 22 huruf C barang seperti kedelai gandum, dan 0,5% tepung terigu.

Khusus pada tanggal 1 April 2022 PMK NO 41/PMK.010/2022 didukung secara resmi. Sesuai persepsi mendasar yang dibuat, Kantor Administrasi Pengawasan Tradisi sebenarnya menggunakan PMK NO 110/PMK.010/2018 dalam hal perubahan retribusi dan barang tambahan telah dilakukan sesuai PMK NO 41/PMK.010/2022 sebelum 1 April 2022. Perubahan atas PMK No. 110/PMK.010/2018 yang mengkaji perubahan Pedoman Imam Uang No. 34/PMK.010 (2017) tentang penmacaman penilaian pribadi Pasal 22 adalah PMK No. 41/PMK.010/2022. dievaluasi sebagai fundamental 41/PMK.010/2022 Perubahan dilakukan terhadap rundown barang yang dikenakan bermacam-macam pengeluaran pribadi berdasarkan Pasal 22 karena penyesuaian teknik pengelompokan produk dan pelaksanaan kewajiban impor permintaan barang impor pada tahun 2022.

### **Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 tentang Kegiatan Impor Barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado sesuai PMK NO 41/PMK.010/2022.

### **Pernyataan Masalah**

Peneliti dapat mengembangkan kekhawatiran mengenai judul studi berikut dengan mempertimbangkan penekanan latar belakang yang disebutkan di atas:

1. Apakah penerapan PPh oleh KPP Bea Cukai Manado terhadap produk impor berdasarkan Pasal 22 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.010/2022?
2. Bagaimana Analisis Akuntansi Pajak di KPP Bea Cukai Manado terhadap pencatatan PPh Pasal 22 atas Impor Barang?

### Tujuan Penelitian

Menurut bagaimana masalah ini dinyatakan di atas, tujuan berikut harus dicapai dalam penelitian ini:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.010/2022 mengatur bagaimana KPP Bea Cukai Manado menghitung tarif PPh pasal 22 atas produk impor.
2. Melakukan evaluasi terhadap tindakan pencatatan PPh berdasarkan Pasal 22 atas impor barang di KPP Bea Cukai Manado

### Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk Peneliti  
Hal ini diantisipasi bahwa hal itu akan berkontribusi pada perluasan sumber daya studi untuk studi masa depan yang bertujuan untuk memajukan pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi pajak.
2. Berbagi Tempat Penelitian  
Diantisipasi bahwa bahan akan disediakan untuk digunakan importir sebagai pedoman sambil menyelesaikan proses kegiatan impor dan menerapkan pasal 22 pajak penghasilan.
3. Bagikan penelitian lebih lanjut  
Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi sumber untuk studi lebih lanjut.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Pengertian Akuntansi

Praktik pencatatan, pengkategorian, dan peringkasan transaksi dan peristiwa keuangan dikenal dengan istilah akuntansi (Mustika 2022a). Sistem informasi yang dikenal sebagai akuntansi adalah sistem yang memberikan catatan atau laporan kepada pemangku kepentingan tentang berbagai kegiatan ekonomi dan kesehatan atau status bisnis.

Akuntansi adalah "bahasa perusahaan dan sistem informasi yang mengukur operasi, menganalisis data menjadi laporan, dan menyampaikan hasil untuk pengambilan

keputusan yang akan membuat keputusan yang akan mempengaruhi kegiatan bisnis," menurut Harrison et al. (2011: 3). Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi suatu perusahaan, menurut Rudianto (2009: 4).

#### Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Johar Arifin (2007: 12). Berikut penjelasan mengenai akuntansi pajak: "Kemampuan wajib pajak untuk memahami akuntansi pajak akan memungkinkan mereka untuk membuat atau memelihara laporan keuangan. Laporan keuangan menguraikan dampak keuangan dari transaksi dan kejadian lain yang dikategorikan ke dalam berbagai kategori yang cukup besar berdasarkan sifat ekonominya. Aset, kewajiban, dan ekuitas adalah komponen yang terkait langsung dengan pengukuran situasi keuangan. Sedangkan pendapatan dan beban merupakan faktor yang terkait dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil operasi".

Akuntansi pajak: pemahaman. Kompetensi dalam mengumpulkan, menyimpulkan, dan mencatat juga memperjelas pembahasan keuangan yang dibuat untuk pengusaha dan ingin menentukan jumlah PKP yang diperoleh dalam masa pajak untuk digunakan sebagai aturan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersangkutan oleh pengusaha sebagai WP. Bidang akuntansi yang menghitung, menyusun, menjelaskan, bahkan membahas, dan menciptakan strategi perpajakan yang relevan secara sederhana dikenal dengan istilah akuntansi pajak (Akuntansi dan Ratulangi 2018a).

#### Pajak

Para ahli telah mengusulkan berbagai definisi atau pembatasan pajak, yang semuanya pada dasarnya bertujuan untuk mendefinisikan pajak dengan cara yang mudah dipahami. Satu-satunya hal yang

membedakan kedua definisi pajak tersebut adalah sudut pandang partai. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo, apa itu pajak? (2011: 1) Pajak adalah kontribusi warga negara ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat ditegakkan tanpa harus memberikan layanan timbal langsung yang dapat dibuktikan (kontra-kinerja). Pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran publik. Pajak atas penghasilan (PPh) Pasal 22

**Cara Menyetor PPh Pasal 22 atas Impor**

Khusus sehubungan dengan pembayaran penyerahan barang, termasuk dalam arti bendahara wajib bertindak sebagai pemegang kas dan pejabat lainnya menjalankan fungsi yang sama, PPh Pasal 22 adalah pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau instansi pemerintah, dan lembaga negara lainnya. Karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau importir yang bersangkutan, menyetorkan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22 atas produk impor ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

**Cara Melaporkan PPh Pasal 22 atas Impor**

Sistem pengungkapan pengeluaran pribadi Pasal 22 impor diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 7 yang menyatakan: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan pengumpul biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, dan huruf k, harus melaporkan konsekuensi dari bermacam-macam menggunakan formulir Pemerintah Periode ke Kantor Administrasi Penilaian, di mana perincian untuk Pasal 22 biaya tahunan diselesaikan 7 hari setelah angsuran oleh pengirim. Pasal 22 Bea pribadi atas impor yang telah disimpan dan dirinci pada dasarnya adalah uang muka

pengeluaran dan dapat dikreditkan dalam bentuk Pemerintah Tahunan Tahunan. Dalam hal barang impor terkait dengan pembayaran yang tunduk pada Penilaian Pribadi Pasti, maka Pasal 22 Biaya Pribadi Impor tidak dapat dikreditkan dalam bentuk Pemerintah Tahunan

### **Pengertian Import dan Importir**

Impor adalah setiap pergerakan memasukkan barang dagangan dari luar Daerah Tradisi ke Wilayah Tradisi. Organisasi eksekutif (PPJK) adalah elemen bisnis yang melakukan latihan dewan untuk memenuhi komitmen bea cukai untuk dan di bawah kekuasaan pedagang atau eksportir. Beban Impor (PDRI) adalah bea masuk yang dibebankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang dagangan. PDRI terdiri dari beberapa macam pengeluaran, tepatnya Pasal 22 Bea Masuk Pribadi, Tangki dan Biaya Transaksi Barang Mewah (PPnBM). PPh Pasal 22 adalah kewajiban yang dipaksakan mengenai angsuran untuk pengangkutan barang dagangan dan latihan di bidang impor atau latihan usaha di berbagai bidang. Tank adalah tugas yang dibebankan pada nilai tambahan yang layak atau administrasi. PPnBM adalah biaya yang dikenakan pada pengangkutan atau impor barang dagangan bernama pemborosan. Impor adalah tindakan memasukkan produk di wilayah tradisi. Organisasi atau orang yang menyelesaikan latihan impor disebut pedagang (L. B. Pajak et al. 2020).

### **Budaya**

Bea cukai pada dasarnya terdiri dari dua frasa, yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Tarif itu sendiri dapat dilihat sebagai pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas barang-barang yang diimpor dan diekspor. Sedangkan cukai dapat dipahami sebagai pajak negara atas komoditas dengan sifat atau kualitas tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pemerintah mengenakan bea masuk

atas barang-barang yang diimpor, diekspor, dan memiliki karakteristik tertentu, sesuai dengan konsep yang diberikan di atas. Bea cukai, pada dasarnya, adalah biaya tambahan yang terkait dengan produk tertentu (Admin dua 2022).

### **Pengertian Angka Pengenal Impor (API)**

Nomor identifikasi impor, sering dikenal sebagai API, adalah izin atau sertifikat identifikasi importir yang dikeluarkan pemerintah kepada individu, badan usaha, atau keduanya untuk melakukan kegiatan impor. berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/MDAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir.

### **Pengertian PIB**

Menurut ide self assessment, Pemberitahuan Impor Produk (PIB) adalah formulir pemberitahuan yang disampaikan oleh importir kepada bea cukai mengenai barang impor. Faktur, daftar pengepakan, dan tagihan asuransi lading / airway bill adalah beberapa contoh dokumen yang ditemukan dalam dokumen tambahan PIB.

### **Penelitian Sebelumnya**

Rana Melati M, aukonda (2021) Pemeriksaan ini penting agar merchant yang mengimpor melalui pusat Surat Bea dan Cukai Malang dapat mengetahui sistem pelaksanaan impor, khususnya impor transfer dan tarif pengeluaran tahunan pasal 22 yang diterapkan ke TPS Malang. Strategi yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan teknik subjektif. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dengan mengarahkan pertemuan, persepsi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik untuk latihan impor dan beban penilaian pribadi pasal 22 yang diterapkan pada pusat Pos Malang sesuai metodologi yang tepat, namun masih banyak pengirim yang hampir tidak terbiasa dengan sistem ini, sehingga harus ada upaya dari pekerja dalam menjelaskan tentang strategi ini (Kasus, Kantor, dan Bea Cukai 2021)

Agil Rifandi Abd Azis dan Novi Budiarmo, (2016) Alasan peninjauan kembali adalah untuk mengetahui bagaimana pemilahan dan perincian Pasal 22 Pengeluaran Orang Pribadi (PPH) pada latihan impor di KPP Tradisi dan Ekstrak di Manado sesuai dengan Undang-Undang tentang Pedoman Uang No. 175/PMK.011/2013. Karena peninjauan dilakukan, sistem pengumpulan dan perincian pengeluaran tahunan Pasal 22 untuk latihan impor produk di KPP Tradisi dan Ekstrak di Manado adalah sesuai dengan Pedoman Pendeta Uang No. 175/PMK.011/2013. Dimana sistem pengumpulan pengeluaran pribadi Pasal 22 atas produk impor bergantung pada pemanfaatan Nomor ID Impor (Programming interface) sebesar 2,5% atau yang tidak menggunakan Nomor Bukti Pembeda Impor (Non Programming interface) sebesar 7,5%. Sedangkan sistem pengungkapan diperkenalkan sebagai laporan pada bulan yang sedang berlangsung dan dirinci sebelum tanggal empat belas bulan berikutnya. Ketepatan dalam memeriksa laporan dalam latihan impor sangat penting untuk mencegah kesalahan dan pelanggaran aturan dalam siklus impor (Gathering et al. 2016)

Nita Mustik, (2022) penelitian ini bermaksud memilah bagaimana pemanfaatan akuntansi Pasal 22 Biaya Individu (PPH) atas Impor Barang di PT. Indika Tirta Mandiri, apakah sesuai dengan pedoman kewajiban yang bersangkutan. Dari hasil akhir audit, secara umum akan dipertimbangkan bahwa penilaian dan penyimpanan Pasal 22 Kewajiban Individu (PPH) di PT Indika Tirta Mandiri sesuai dengan Pedoman Biaya yang tepat dan PT. Indika Tirta Mandiri telah menyelesaikan akuntansi sesuai dengan PSAK (Mustika 2022b). Desi Kurniawati, (2021) alasan dari usaha terakhir ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan yang menjadi objek dari Pasal 22 Pengeluaran

Pribadi dan Bea Masuk Layak yang dilakukan di PT XYZ, menggambarkan dan memahami estimasi tarif penilaian atas latihan impor barang dagangan di PT XYZ, menggambarkan dan memahami kewenangan, serta cara menyimpan dan melaporkan Pasal 22 Bea Masuk Tahunan dan Penilaian Nilai Tambah, dan menggambarkan pencatatan buku harian pembukuan angsuran untuk latihan pembebanan impor produk yang diselesaikan oleh PT XYZ. Objek Pasal 22 Bea Masuk Tahunan dan Penilaian Layak Termasuk impor barang dagangan, khususnya latihan impor pendingin dan lemari es, latihan ini sesuai pengaturan pasal 22 item Biaya Tahunan dan protes Bea Masuk Tambahan Senilai yang telah diarahkan dalam peraturan dan harus cenderung Pasal 22 Biaya Pribadi dan Tangki. Ketidaknyamanan Pasal 22 tugas pribadi dan Tangki atas impor barang dagangan dikenakan pajak sebesar 10%, 7,5% dan 0,5% dari nilai impor dan 10% dari impor insentif untuk tarif Tangki. Di PT XYZ untuk pasal 22 impor tarif pengeluaran pribadi dan Tangki, khususnya 2,5% dan 10% sesuai Kode HS yang telah diatur dalam peraturan. Berbagai macam Pasal 22 pengeluaran pribadi dan Tangki atas impor produk dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kurniawati 2021).

Dikdik Maulana, (2020) mengingat konsekuensi eksplorasi PT MPT telah menyelesaikan sistem Penghitungan, Penyimpanan dan Pengungkapan Pasal 22 Pengeluaran Pribadi atas impor sesuai Peraturan Bea Masuk dan dapat menjadikan Penilaian Tahunan Pasal 22 sebagai pengurangan pajak atas formulir Pemerintah Tahunan (Dengan, Tertentu, dan Pt n.d.)

Aufa Naily Nafahatin Mempertimbangkan hasil investigasi di PT Thoma. Pendekatan yang paling dikenal luas untuk acara sosial Pasal 22 biaya individu dan tangki impor diakumulasikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Penilaian biaya individu Pasal 22 dibatasi pada PT Tohoma Mandiri dengan kewajiban 2,5% dari hal impor karena PT Tohoma Mandiri memiliki Nomor ID Vendor (Programming connection point). Pada impor produk, PT Tohoma Mandiri juga bergantung pada Tank pada kecepatan 10%. Toko dibuat sesuai dengan aturan DGCA, yang telah menyelesaikan kode pengisian untuk bea cukai dan bagian permintaan konsentrat. Pengungkapan Pasal 22 Biaya Individu atas Impor PT Tohoma Mandiri diselesaikan oleh DJBC selambat-lambatnya tujuh hari setelah pengumpulan. Kemudian, PT Tohoma Mandiri melaporkan Pasal 22 biaya individu pada struktur Evaluasi Tahunan, sedangkan Tangki diwakili pada struktur Biaya Periode Tangki Februari. Pencatatan porsi dilakukan dengan pengisian rekening Komitmen Impor, Tangki Data, dan Evaluasi Tahunan Impor Pasal 22 serta pengkreditan Kas/Bank. Penilaian Penggunaan Pasal 22 Kewajiban Tahunan dan Tangki atas Impor Stiker Penertul Cahaya di PT Tohoma Mandiri yang mengintegrasikan penghuni, pengisian benda, pengumpulan, penilaian, penyimpanan dan pengungkapan sesuai Pedoman Biaya dan materi Peraturan Menteri Keuangan (P. Pajak, Pasal, dan Pajak 2020). Putri Tazkia Fadhilah (2020) Alasan penelitian ini adalah untuk menggambarkan objek tugas di PT PTF dan menggambarkan bermacam-macam, estimasi, menyimpan, dan merinci Pasal 22 Biaya Tahunan dan Tangki serta mencatat dan menilai penggunaan Pasal 22 Tugas Pribadi dan Tangki yang dipaksakan pada latihan impor. Strategi yang digunakan dalam pengamanan informasi adalah teknik persepsi / persepsi, pertemuan, dan studi penulisan. Objek pengeluaran PT PTF adalah perangkat keras mesin seperti sekrup, barel, dan granulator untuk komponen yang tidak dimurnikan untuk pembuatan. Berbagai macam bea masuk tahunan Pasal 22 dan Tangki impor dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Bea

Cukai. Estimasi PPh Pasal 22 dipaksakan kepada PT PTF dengan kecepatan 2,5% dari nilai impor karena PT PTF memiliki Merchant Distinguishing proof Number (antarmuka Pemrograman). Pada impor barang dagangan, PT PTF juga bergantung pada Tank dengan kecepatan 10%. Penyimpanan Pasal 22 pengeluaran pribadi dan Tangki impor dibayar oleh pihak perantara, khususnya PPJK (Administrasi Kepabeanaan Para eksekutif Bisnis visioner). Tugas pribadi mengumumkan Pasal 22 pada formulir Pemerintah Tahunan, sementara Tank dicatat pada Pengembalian Tank Juli. Penilaian Penggunaan Pasal 22 Pengeluaran Pribadi dan Tangki atas Impor barang dagangan di PT PTF yang mencakup warga negara, objek beban, bermacam-macam, perhitungan, penyimpanan dan pengumuman sesuai dengan Peraturan Tugas dan Pedoman Pendeta Uang yang relevan (Produk, KKP, dan Damili 2020).

Rendy Sampouw dan Inggriani Elim (2019) Alasan penelitian ini adalah untuk memutuskan bagaimana estimasi, penyimpanan dan pengumuman Penilaian Pribadi Pasal 22 atas perolehan barang dagangan yang didanai oleh rencana Keuangan Negara di Kantor Administrasi Kustodian Negara Kota Manado sesuai Pedoman Pendeta Uang Nomor 34/PMK.010/2017 (Sampouw et al. 2019).

Gladys Mita Marthina Bala, David P. E. Saerang, Inggriani Elim, (2018) Sistem untuk memastikan, mencatat dan menyimpan Tangki yang terutang oleh PT Makmur Auto Mandiri adalah sesuai peraturan dan pedoman tugas material, khususnya Peraturan No. 42 tahun 2009. Sistem untuk memastikan, mencatat dan menyimpan Pasal 22 penilaian pribadi yang terutang oleh PT Makmur Auto Mandiri adalah sesuai dengan pedoman peraturan tugas yang relevan, khususnya Peraturan No. 36 Tahun 2008 (Pembukuan dan Ratulangi 2018c).

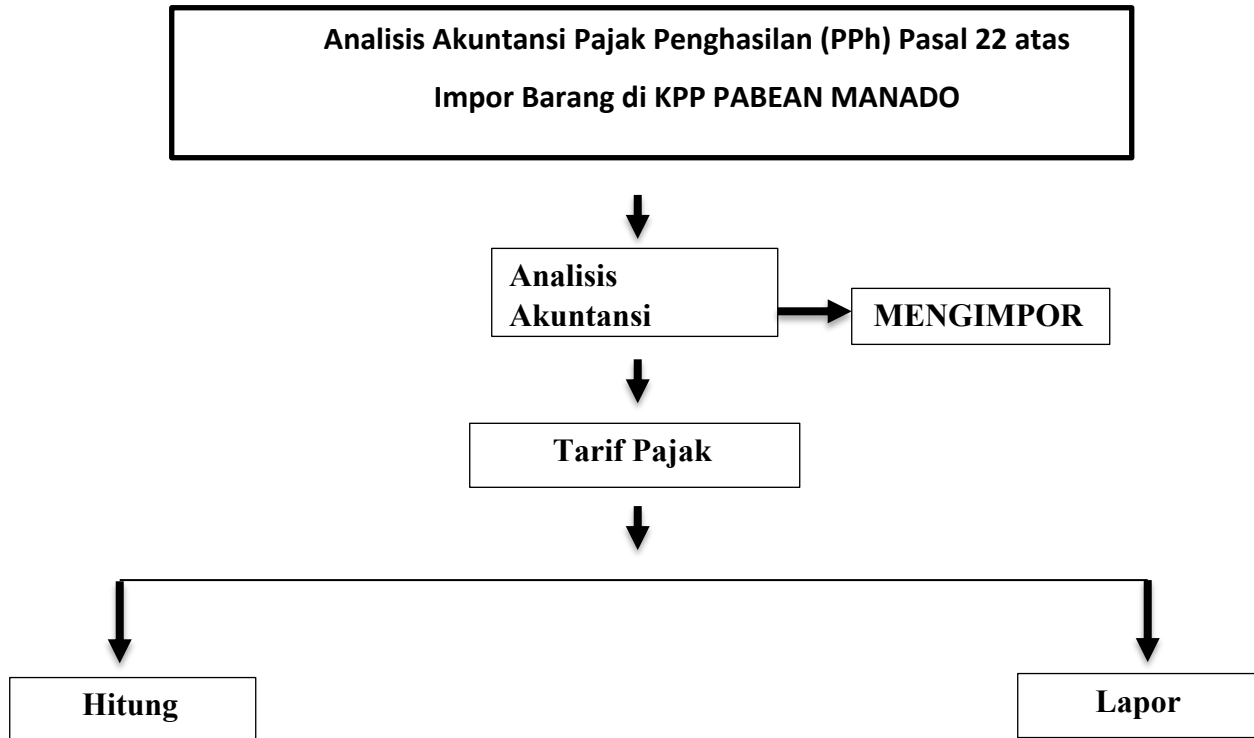
(Azarine Sava Vania Slamet 2021) Penelitian ini bermaksud memutuskan bermacam-macam, menyimpan, dan mengungkapkan Pasal 22 Biaya Tahunan pada Pemerintah Kota Krasak, Wilayah Brebes, Rezim Brebes. Metode bermacam-macam informasi yang digunakan adalah investigasi observasional, pertemuan dan dokumentasi. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari rundown Uang Pembantu Tugas Pemerintah Kota Krasak periode 2020 pada bulan Desember. Sedangkan strategi investigasi informasi yang digunakan adalah pemeriksaan subjektif yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Krasak, Wilayah Brebes, Peraturan Brebes dalam mengumpulkan, menyimpan, dan merinci pasal 22 pengeluaran pribadi tidak sesuai pedoman yang relevan. Dari hasil ini, Pemodal Pemerintah Kota Krasak harus menyelesaikan komitmen penilaiannya dalam mengumpulkan, menjaga, dan mengumumkan pasal 22 tugas pribadi sesuai pengaturan Pedoman Imam Uang No. 231 / PMK.03 / 2019 agar tidak cenderung membebani sanksi organisasi (Anon 2021)

### **Kerangka berpikir**

Badan usaha milik pemerintah dan swasta yang melakukan kegiatan operasi ekspor dan impor dikenakan pajak yang diuraikan dalam PPh Pasal 22. Jumlah pajak ini bervariasi tergantung pada kolektor, barang, dan sifat transaksi. Pasal ini didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. PPh Pasal 22 adalah jenis pajak yang dikenakan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan transaksi bisnis yang melibatkan pertukaran produk.

Impor adalah proses mendatangkan barang asing melalui bea cukai; Kegiatan ini dikendalikan oleh bea cukai. Undang-undang membebaskan importir sejumlah pajak atas setiap barang impor.





**METODOLOGI PENELITIAN**

**Desain Penelitian**

Data untuk penelitian kualitatif deskriptif ini dikumpulkan melalui pengamatan langsung wawancara di perusahaan atau lembaga yang menjadi subjek penelitian. Data tersebut kemudian diperiksa dan diproses lebih lanjut.

**Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan BEA dan CUKAI MANADO yang berlokasi di Jl. A.A Maramis, Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara.

**Sumber Data**

Dalam eksplorasi subyektif, jenis sumber informasi sebagai orang dalam penelitian pada umumnya adalah sebagai responden (responden). Tempat sumber informasi sebagai people (asset people) adalah data vital as a person. Spesialis dan orang aset di sini memiliki posisi yang sama, dengan cara ini individu aset tidak hanya

memberikan reaksi terhadap apa yang diminta ilmuwan, namun ia dapat mendukung kursus dan selera dalam memperkenalkan data yang dimilikinya (Sutopo, 2006: 57-58). Sesuai Lofland dan Lofland (1984: 47) sumber informasi utama dalam pemeriksaan subjektif adalah kata-kata, dan kegiatan, sisanya adalah informasi tambahan seperti catatan dan lain-lain. Kata-kata dan kegiatan individu yang diperhatikan atau diajak bicara adalah sumber utama informasi. Sumber informasi utama dicatat melalui set up account atau melalui kaset video/suara, foto, atau film (Moleong, 2007: 157). Spesialis bekerja untuk mengubah bidang studi yang menjadi objek pemeriksaan mereka. Spesialis bekerja dengan mengumpulkan informasi dari induktif secara total, yang nantinya akan membuat laporan yang lebih lengkap. Pengumuman dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang sebanding dan diberi kode sendiri. Informasi dikumpulkan melalui wawancara, persepsi,

dan dokumentasi (bermacam-macam bukti, penentuan, penanganan, dan penimbunan data).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data primer dan data sekunder merupakan dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder berasal dari bukti, catatan, atau narasi sejarah yang telah dirangkai dalam arsip atau film, data primer berasal dari observasi dan wawancara. (Tangkau, Mumuh, dan Tala 2021)

#### a) Wawancara

Wawancara, menurut Sugiyono, adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur, secara langsung atau menggunakan jaringan telepon.

Koentjaraningrat mengklaim bahwa wawancara adalah teknik yang digunakan untuk tugas tertentu, seperti mencari informasi dan membangun responden secara verbal untuk berkomunikasi secara langsung.

Wawancara dengan Ibu Millatul Haqqe, Pelaksana dan Konselor KPP Bea Cukai Manado. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi terkait Pasal 22 Analisis Akuntansi Pajak Kegiatan Impor Barang. .

#### b) Pengamatan

Patton (1990: 201 dalam Poerwandari, 1998)

Salah satu strategi utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif, adalah observasi. Sebagai prosedur ilmiah dalam penelitian, hal ini dilakukan untuk mengumpulkan

data yang handal dan tepat. Para peneliti yang telah mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan memiliki desain persiapan yang menyeluruh dan penuh harus melakukan pengamatan mereka.

#### c) Dokumentasi

Sugiyono mengklaim bahwa itu adalah metode untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk laporan, informasi, dan data yang dapat membantu penelitian dalam bentuk buku, arsip, dokumen, nomor tertulis, dan foto.

### **Teknik Analisis Data**

Sebelum melakukan investigasi lapangan dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan, dan investigasi lapangan dilanjutkan sampai temuan studi dilaporkan. Dari saat peneliti memilih topik penelitian ke titik di mana laporan penelitian siap, analisis data dilakukan. Akibatnya, teknik analisis data digunakan selama proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Analisis data adalah proses penataan urutan data, pengorganisasiannya ke dalam suatu pola, kategori, dan unit deskripsi dasar, menurut Ardhana<sup>12</sup> (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103).

Dalam karya ini, peneliti menerapkan metode analisis data interaktif berdasarkan Miles dan Huberman yang melibatkan reduksi data, visualisasi data, dan verifikasi data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik selama pengumpulan data dan ketika pengumpulan data selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan. Peneliti sudah melakukan analisis terhadap tanggapan narasumber sebelum wawancara. Menurut Miles dan Huberman (1984), kegiatan dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai selesai, menjenuhkan data. Tugas analisis data meliputi reduksi data, visualisasi data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2007: 246).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Lokasi Penelitian

Berdasarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Pabean Manado Tipe C Tipe C merupakan instansi vertikal yang bertugas memastikan kebijakan pemerintah mengenai pergerakan barang masuk dan keluar dari daerah pabean Indonesia serta pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tanggung jawab dan melaksanakan kegiatannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memainkan peran penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Manado sebagai pusat komersial di Provinsi Sulawesi Utara.

### Hasil Penelitian

Direktur Jenderal Bea dan Cukai membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan maksimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

"PMK No. 41/PMK.010/2022 merupakan perubahan atas PMK No. 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dan dengan demikian dilakukan penyesuaian daftar barang yang dikenakan pemungutan PPh Pasal 22. Penyesuaian tersebut dipandang perlu karena adanya perubahan sistem klasifikasi barang dan pengenaan tarif bea masuk atas barang impor pada tahun 2022.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan PMK Nomor 41/PMK.010/2022 tanggal 1 April 2022 yang telah tercatat dalam PMK pasal II nomor 41/PMK.010/2022, terhadap pedoman ini mulai tanggal 1 April 2022 semua produk yang dibawa yang masuk dalam klasifikasi kemungkinan Pasal 22 Bea Masuk Impor telah mengikuti berapa macam-macam penilaian tahunan pasal 22 sesuai PMK. Berbagai macam biaya pribadi impor Pasal 22 dibayarkan dan diganti secara bersamaan sebagai angsuran kewajiban impor. Berapa permintaan Impor Biaya Pribadi Pasal 22 sesuai Perpanjangan Surat A – C yang tercatat dalam PMK nomor 41/PMK.010/2022. Berapa tuntutan Asesmen Pribadi Pasal 22 yang diterapkan pada WP yang tidak memiliki NPWP 100 persen lebih tinggi daripada tarif yang diterapkan pada WP yang dapat menunjukkan NPWP. Semua impor barang dagangan yang diingat untuk kelas yang tunduk pada Pasal 22 Biaya Tahunan Impor telah dikumpulkan ketika PMK 41/PMK.010/2022 berlaku. Dalam menyusun PPh 22 tentang kegiatan impor barang dagangan, penting untuk fokus pada berapa banyak tarif kewajiban impor yang akan dipaksakan pada semuanya berdasarkan jenisnya sesuai pedoman material.

### Pembahasan

Saksi-saksi dalam penelitian ini adalah 3 narasumber, dimana 3 saksi merupakan perwakilan dari KPP Bea dan Cukai Manado. Saksi akan diperkenalkan sebagai A, B, dan C untuk bekerja dengan perencanaan pemeriksaan ini. "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan PMK Nomor 41/PMK.010/2022 tanggal 1 April 2022 yang telah tercatat dalam PMK pasal II nomor 41/PMK.010/2022, terhadap pedoman ini mulai tanggal 1 April 2022 semua barang dagangan yang dibawa yang termasuk dalam klasifikasi bertanggung jawab atas Bea Masuk Pasal 22 telah

mengikuti berapa besar bermacam-macam pengeluaran pribadi pasal 22 sesuai PMK (Saksi An dan B, Korespondensi Individu 02 Walk 2023)". " Penetapan Tahunan Pasal 22, PMK No. 41/PMK.010/2022 dipandang mendasar karena adanya perubahan kerangka penataan barang dagangan dan beban tarif kewajiban impor atas barang impor tahun 2022, dengan demikian dilakukan perubahan rundown barang dagangan yang dikenakan Pasal 22 penetapan bea masuk tahunan (Sumber C, Korespondensi Perorangan 02 Jalan 2023)"

Buku Retribusi Tradisi Indonesia (BTKI) adalah alasan untuk estimasi karena untuk memutuskan Kewajiban Impor, Anda harus mendaftar ke Buku Tugas Tradisi Indonesia (BTKI). Pedoman Bicara Tokoh Uang Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Buku Adat Retribusi Indonesia (BTKI) menjadi sumber dalam penetapan tarif Bea Masuk.

Untuk menyelidiki estimasi interaksi pelaksanaan impor barang dagangan di Kantor Pengawasan dan Administrasi Bea dan Cukai Manado, diperlukan Catatan Peringatan Impor Produk (PIB). Catatan Peringatan Impor Produk (PIB) dalam pemeriksaan kemudian melihat apakah ada kesalahan antara estimasi Kantor Pengawasan dan Penatausahaan Bea dan Cukai Manado dengan PMK No. 41/PMK.010/2022. Hal ini cenderung ditunjukkan bahwa selama waktu yang dihabiskan untuk memastikan penilaian pribadi Pasal 22 pada latihan impor produk, tidak ada perbedaan, menyiratkan bahwa Kantor Pengawasan dan Administrasi Bea Cukai dan Ekstrak Manado telah melaksanakan Pedoman Pedoman Uang (PMK) Nomor 41/PMK.010/2022.

Setelah nilai tradisi produk impor ditentukan, pedagang harus mencatat Pasal 22 kewajiban pribadi yang harus dibayar pada catatan hutang penilaian. Ini penting untuk bekerja dengan cara paling umum

untuk membayar penilaian pribadi Pasal 22 pada waktu yang telah ditentukan. Pencatatan bea masuk tahunan Pasal 22 atas latihan impor produk diperoleh dari efek samping penyelidikan pada arsip pemberitahuan impor barang dagangan. PPh Pasal 22 harus disimpan pada bank dagang yang tidak dikenal, atau bank pesi, atau pemodal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam waktu paling lambat 1 hari setelah penagihan bermacam-macam dan dijawab kepada KPP selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyimpanan biaya.

Pada tahun 2021, Rana Melati Maukonda juga menganalisis impor produk, konsekuensi pemeriksaan menunjukkan bahwa teknik untuk latihan impor dan beban biaya pribadi pasal 22 yang diterapkan pada Stasiun Pos Malang sesuai metodologi yang relevan, namun masih banyak pengirim yang hampir tidak terbiasa dengan sistem ini, Jadi harus ada upaya dari pekerja dalam menerangi tentang strategi ini. Pada tahun 2018, pelaksanaan impor juga menerapkan pajak yang sama seperti saat ini, namun dalam pedoman terbaru sesuai PMK No. 41/PMK.010/2022 terdapat perubahan kerangka karakterisasi produk dan beban bea masuk atas barang impor pada tahun 2022, sehingga dilakukan perubahan pada rundown barang dagangan yang tunduk pada Pasal 22 penilaian tahunan bermacam-macam. Dalam buku kewajiban adat Indonesia (BTKI) terdapat perubahan yang sangat mendasar dibandingkan dengan BTKI 2017. Pada Bagian 1 sampai 97 BTKI 2022, terdapat 11.414 pos retribusi dari 10.813 pos pajak sebelumnya. Untuk sementara, pasal 98 dan 99 diperluas menjadi 138 pos retribusi dari 28 pos pajak sebelumnya. Eksplorasi ini didukung oleh pemeriksaan sebelumnya, yang membahas tentang bermacam-macam dan estimasi Latihan Impor Barang Pribadi Pasal 22, namun pada eksplorasi sebelumnya menggunakan PMK NO 175/PMK.011/2013.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Dengan menggunakan Nomor Identifikasi Produk dan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, tarif pajak impor dihitung sesuai dengan Pasal 22 Pajak Penghasilan atas kegiatan Impor Barang dan didasarkan pada jenis barang yang diimpor (BTKI).
2. Analisis Pencatatan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang dilakukan dengan menganalisis data dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

### Saran

1. Saran untuk peneliti, lebih fokus menganalisis data Pemberitahuan Impor Barang agar tidak terjadi kesalahan dalam proses perhitungan.
2. Petugas bea cukai Manado harus memeriksa dokumen PIB secara akurat untuk memberikan saran kepada Kantor Pengawasan dan Layanan Bea dan Cukai Manado dan mencegah pelanggaran aturan dan kesalahan yang dapat terjadi selama impor barang oleh bisnis atau organisasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisis suatu data, kelengkapan data sangat diperlukan agar dalam proses penelitian tidak terjadi kekurangan data.

### Daftar pustaka

- Abd Azis, A. R., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Pph Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Admin Dua. 2022. "Mengenal Bea Cukai: Pengertian, Sejarah, Dan Fungsi." *Rdn Rusdiono Consulting*. Akuntansi, Jurusan, And Universitas Sam Ratulangi. 2018a. "3 1,2,3." 13(563):67-75.
- Akuntansi, Jurusan, And Universitas Sam Ratulangi. 2018b. "3 1,2,3." 13(2):30-37.
- Akuntansi, Jurusan, And Universitas Sam Ratulangi. 2018c. "3 1,2,3." 13(4):404-11.
- Barang, Impor, Pada Kkp, And Adam Damili. 2020. "No Title."
- Dengan, Impor, Tarif Tertentu, And Pada Pt. N.D. "1, 2 1,2." 11-22.
- Gloria I.P Manopo, Ventje A.Senduk, Aprili Bacillus. 2021." *Jurnal Akuntansi Manado* 2(3):368.
- Kasus, Studi, Pada Kantor, And Pelayanan Bea. 2021. 22.
- Kurniawati, Desi. 2021. "Dan Ppn Atas Kegiatan Impor Barang Di Pt Xyz Program Studi Akuntansi."
- Langi, Veronita, Robert Winerungan, And Frida Magda Sumual. 2020. *Jurnal Akuntansi Manado* 1(3):30.
- Mumuh, Lucky Andhini, Jaqueline E. .. Tangkau, And Olifia Yodiawati Tala. 2021. "": *Jurnal Akuntansi Manado* 2:359.
- Mustika, Nita. 2022a. "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Atas Impor Barang Pada PT Indika Tirta Mandiri." 35.
- Mustika, Nita. 2022b. "Atas Impor Barang Pada Pt Indika Tirta Mandiri." 3(1).
- Pajak, Latar Belakang, Undang-Undang Nomor, Ketentuan Umum, Tata Cara Perpajakan, Data Kementerian Keuangan, Anggaran Pendapatan, Belanja Negara, Direktorat Jendral Pajak, Pajak Penghasilan, Pph Pasal, Pajak Pertambahan Nilai, Pph Pasal, Menurut Widjaja, Daerah Pabean, Daerah Pabean, Perusahaan Pengurusan, Jasa Kepabeanan, Pajak Dalam, Rangka Impor, Direktorat Jendral Bea, Pph Pasal, Pajak Penjualan,

- Barang Mewah, And Pph Pasal. 2020. "I Pendahuluan 1.1." 1–3.
- Pajak, Penerapan, Penghasilan Pasal, And D. A. N. Pajak. 2020. "Cahaya Pada Pt Tohoma Mandiri Program Studi Akuntansi."
- Pemungutan, Analisis, D. A. N. Pelaporan, Pajak Pph, Pasal Atas, Impor Barang, Pada Kantor, Pelayanan Dan, Pengawasan Bea, And D. A. N. Cukai. 2016. ARTICLE 22 ON IMPORTS GOODS OF." 4(1):753–62.
- Sampouw, R., I. Elim, Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan, Pelaporan Pajak, Pasal Atas, Pembelian Barang, Yang Dibiayai, Oleh Apbn, Pada Kantor, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam, And Ratulangi Manado. 2019.
- SITI RESMI. 2019. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. 11 Buku 1. Salemba Empat.